

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Judul

Parlemen adalah badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara atau Dewan Perwakilan Rakyat, atau sekumpulan orang yang dipilih atau diutus oleh partai atau kelompok yang berkompeten untuk mensuarakan hal ikhwal yang menyangkut kepentingan rakyat dan negara mengenai aturan-aturan maupun perundang-undangan demi keteraturan dan kelancaran pengelolaan suatu negara. (KBBI, 2009).

Gedung Parlemen merupakan sarana dimana tempat berkumpulnya para wakil rakyat untuk membahas maupun membuat aturan dan perundang-undangan untuk kepentingan rakyat dan negara. Sebagai negara baru yang memiliki kebutuhan-kebutuhan utama, yang sangat penting untuk kelancaran pengelolaan pemerintahan, salah satunya seperti tersedianya gedung parlemen sebagai sarana tempat berkumpulnya para wakil rakyat untuk:

- Membuat perundang-undangan dan aturan mengenai pengelolaan negara.
- Mengsahkan program pemerintah dan anggaran belanja negara
- Membuat pengawasan terhadap pengelolaan negara oleh pemerintah
- Melantik Presiden sesuai dengan hasil pemilu.
- Membahas permasalahan-permasalahan negara.

1.2. Latar Belakang

1.2.1. Latar Belakang Pengadaan Proyek

Semenjak Colombus melintasi samudra atlantik sekitar tahun 1492 untuk mendarat di benua Amerika, dua puluh tahun kemudian pelaut Portugis mulai melintasi selat Malaka untuk mencari rempah-rempah di pulau sekitar pasifik yang beriklim tropis, yang banyak komoditas pertanian maupun kehutanan yang memiliki nilai jual tinggi di Eropa. Pada tahun 1512 pelaut Portugis mulai mendarat di Pulau *Timor* bagian barat tepatnya di *Lifau* sekarang distrik

We'quci (daerah kanton: teritori negara lain yang berada didalam suatu negara).

Di Pulau *Timor* sebelum kedatangan para pedagang Eropa, ada satu kerajaan yang sangat berpengaruh yang bisa menghimpun raja-raja kecil menjadi satu kerajaan yang menyatu yaitu Kerajaan *We'hale* dan *We'iku*. Setelah kedatangan pedagang Eropa yaitu Portugis dan Belanda, mereka mulai mempengaruhi kondisi tatanan masyarakat setempat, munculah masalah-masalah yang disebabkan oleh kelicikan politik adudomba para pedagang kolonial sehingga timbul keadaan instabilitas, yang menjadi alasan bagi para pendatang asing tersebut untuk membentuk suatu sistem kekuasaan di daerah yang mereka tempati.

Untuk mempertahankan kepentingan dagang, mulailah mereka memperluas kekuasaan dengan aturan-aturan yang diterapkan di masyarakat lokal sehingga lama-kelamaan muncul suatu kolonialisasi pulau *Timor* oleh pedagang Eropa. Akan tetapi dalam perjalanan kolonialisasi ini ada persaingan di antara pendatang Eropa itu sendiri. Banyak bangsa Eropa yang merantau sampai dengan menjajah ke kawasan tersebut untuk mencari rempah-rempah guna mencari nafkah atau meningkatkan perekonomiannya. Ada politik untuk membagi pulau *Timor* menjadi dua bagian sebelah barat dikuasai oleh Belanda dan sebelah timur dikuasai oleh Portugis. Dalam pembagian ini, masih ada daerah *Solor* dan *Belu* di bagian barat yang masih di kuasai Portugis, begitu juga daerah *We'quci* (dibagian barat) dan *Maubara* di bagian timur masih di kuasai Belanda. Dalam perjalanan kolonialisasi ini, kemudian dilakukan pertukaran oleh Portugis dan Belanda seperti *Solor* ditukar dengan *We'quci* dan *Belu* ditukar dengan *Maubara*.

Dekolonialisasi ini banyak penderitaan mulai dialami masyarakat Timor Leste sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan, misalnya pemberontakan *Belu* dan *Maubara* (sekitar tahun 1600), pemberontakan *Manatuto* dan *Luka* (sekitar tahun 1850) dan pemberontakan *Motael*, *Kamanasa*, perang *Kailako* yang walaupun secara sporadis tetapi terjadi dalam waktu yang lama, serta beberapa pemberontakan lokal sampai puncaknya pada pemberontakan

yang di pimpin Oleh *Dom Boaventura* (sekitar tahun 1912) yang ditulis detail pada perjalanan sejarah perjuangan Masyarakat *Timor Lorosa'e (Leste)*.

Akibat dari peran dunia kedua, banyak bangsa yang mengalami penderitaan secara langsung maupun tidak langsung, dampak penderitaan ini juga dialami oleh masyarakat Timor Leste, karena pulau *Timor* merupakan salah satu tempat menghimpun kekuatan Jepang untuk menyerang Australia, banyak korban jiwa masyarakat setempat yang ditimbulkan oleh tentara Jepang. Setelah kekalahan *Nazi Jerman* dan Fasis *Musolini Italia* di Eropa, Jepang juga mengalami kekalahan perang di Asia akibat dijatuhkannya bom atom di kota *Hirosima* dan kota *Nagasaki* oleh sekutu, maka berakhirilah perang dunia ke-dua.

Berakhirnya perang dunia ke-dua, Portugal melihat ada kesempatan untuk kembali berkuasa di Timor Leste dengan mendatangkan pasukan dari jajahannya di Afrika dan dari *Goa India* dengan alasan membasmi sisa - sisa tentara Jepang yang masih berada di kota *Dili*, masuknya kembali Portugis ke Timor Leste, ada perubahan model penjajahan, pemerintah Portugis mulai membuka pendidikan dasar negeri yang sebelumnya hanya dilakukan oleh biarawan Dominikan, akan tetapi karena di Portugal kekuasaan beralih ke penguasa diktator, maka pada koloni-koloni juga di terapkan sistem pengawasan masyarakat yang sangat ketat dengan model Polisi rahasia Portugal (*PSP: Polícia Segrego da Português*). Pengorbanan masyarakat mulai timbul kembali, sehingga munculah pemberontakan pada tahun 1959 di distrik *Viqueque*.

Banyak bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin menentukan kemerdekaan setelah perang dunia ke-dua, ini membuat suatu model persaingan baru muncul, seperti persaingan ideologi dan ekonomi sehingga muncul istilah perang dingin mulai dipakai, hal ini sangat berpengaruh kepada negara-negara baru yang kaya tapi sumberdaya manusianya terbatas. Disamping itu para bekas penjajah (Portugal sebagai salah satu negara di Eropa) tidak memiliki sumber alam yang cukup, dan mengalami banyak persoalan ekonomi karena koloninya di Afrika melakukan pemberontakan

besar-besaran untuk kemerdekaan, banyak tentara Portugis di Afrika menjadi korban peperangan yang tidak ada tujuan, sehingga ini menimbulkan permasalahan internal di tubuh militer Portugis. Pada tanggal 25 April tahun 1974 terjadi revolusi di Portugal, yang kemudian lebih di kenal dengan nama revolusi (pengambilalihan kekuasaan dengan cara damai) yaitu gerakan angkatan bersenjata sayap kiri di Lisbon, sehingga membuat perubahan pada sistem pemeritahan di Portugal. Revolusi membawa demokrasi masuk dalam pemerintahan Portugal, perubahan politik ini memperkuat penegakan demokrasi serta membebaskan hak penentuan nasib sendiri kepada koloni-koloni Portugis.

Koloni-koloni Portugis di Afrika mulai mengalami transisi dijajah menuju ke kemerdekaan. Kemenangan angkatan bersenjata sayap kiri di Portugal sebagai suatu prospek bagi putra daerah Timor Leste untuk menentukan kemerdekaan dari perjuangan panjang yang sudah di rintis di beberapa daerah di Timor Leste sekian lama, dari kondisi perkembangan politik yang ada, masyarakat Timor Leste melihat bahwa syarat utama untuk suatu daerah atau wilayah menentukan suatu sistem administrasi sendiri sebagai suatu negara, sudah terpenuhi oleh Timor Leste yaitu

1. Memiliki Wilayah.
2. Memiliki Masyarakat

Sehingga di *Dili* sekitar bulan Mei tahun 1974 dibentuk komisi penentuan nasib sendiri dan memberi otoritas atau kebebasan untuk masyarakat membentuk partai politik dan bebas menentukan partai politik yang di inginkan. Partai-partai yang didirikan seperti:

1. *UDT (União Demokrática Timórense)* Uni Demokrasi *Timor* dengan keinginan federasi dengan Portugal
2. *ASDT (Associação Sosiál Democrata Timórense)* yang kemudian diubah menjadi *FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor Leste Independente)* Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste, dengan keinginan kemerdekaan dan berdaulat secara penuh.

3. *APODETI (Associação Popular Demokrátika Timórense)*, Asosiasi Popular Demokrasi *Timor* yang menginginkan otonomi di bawah Negara Indonesia.
4. Ada beberapa organisasi atau perkumpulan seperti *Klibur Oan Timor Aswain (KOTA)*, Kelompok pekerja (*Trabalista*), yang memiliki pandangan politik serta pendirian tidak menentu.

Seperti pada umumnya di kawasan lain, koloni-koloni yang mengalami penjajahan, begitu juga di Timor Leste, berdirinya partai politik sebelum adanya suatu sistem yang di persiapkan dengan baik untuk mengawasi dan menjaga jalanya demokrasi berpartai, akan lebih riskan untuk terjadinya konflik antara kelompok-kelompok yang dibentuk, sehingga munculah gerakan bersenjata yang dilakukan oleh *UDT (União Demokrátika Timórense)* sekitar bulan Agustus 1974 untuk memaksakan kehendaknya sendiri dalam menentukan arah politik Timor Leste.

Gerakan bersenjata *UDT (União Demokrátika Timórense)* ini langsung mendapat tanggapan dan perlawanan oleh *FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor Leste Independente)* yang memiliki banyak dukungan mayoritas penduduk *Timor Leste*, sehingga harapan untuk mendirikan negara making kuat, rakyat berasatu dengan kekuatan bersenjata Timor Leste yang berpihak pada *FRETILIN* untuk melawan *UDT* dengan kaum turunan Portugis yang memaksakan kehendaknya sendiri dengan kekuatan senjata.

UDT mengalami kekalahan bersenjata maupun politik di Timor Leste, sehingga terjadi eksodus dari pihak yang kalah politik maupun militer ke wilayah Indonesia yaitu di Atambua NTT, kemudian membuat propaganda politik untuk mendapatkan simpati.

Setelah *FRETILIN (Frente Revolucionária de Timór Leste Independente)* menguasai seluruh wilayah Timor Leste dengan dukungan penuh dari mayoritas penduduk, mulailah dibuat persiapan-persiapan untuk menuju penentuan kemerdekaan penuh, maka dengan kondisi politik yang ada ditentukanlah tanggal **28 November 1975** sebagai hari deklarasi kemerdekaan

dengan nama Negara *República Demokrátika de Timor Leste*, dan Proklamatornya adalah **Fransisco Xavier Do Amaral** sekaligus sebagai Presiden pertama negara *República Demokratika de Timor Leste*. Deklarasi negara baru ini langsung mendapat pengakuan dari empat negara bekas jajahan Portugis di Afrika serta pengakuan dari negara RRC dan Uni Soviet (*Timor Lorosa'e 500 years, Geoffrey C. Gunn*).

Berdirinya negara baru Timor Leste, memunculkan kebutuhan-kebutuhan sebagai suatu negara, seperti gedung perkantoran dan sarana-sarana lain pendukung aktivitas suatu negara merdeka, kondisi ini tidak berlangsung lama pada tanggal 7 Desember 1975 ada invasi dari rezim **Soeharto** (Indonesia) dengan operasi dengan sandi komodo.

Invasi rezim Soeharto (Indonesia) ini menggunakan alasan Komunisme, karena para perintis kemerdekaan Timor Leste yang baru kembali dari Portugal, yang baru mengalami peralihan kekuasaan ke kaum kiri, kondisi ini memperkuat alasan rezim Soeharto bahwa para pemuda ini membawa paham komunisme masuk ke Timor Leste. Para pemuda ini adalah putra daerah yang tidak mendapatkan kesempatan sekolah lebih tinggi melalui lembaga pemerintah Portugis, karena kedekatan dengan para Pastor Katolik Portugis mereka mendapat kesempatan untuk bisa bersekolah lebih tinggi di Portugal melalui koneksi yang dilakukan para Biarawan. Para perintis kemerdekaan Timor Leste ini ada beberapa yang sudah menyelesaikan pendidikan sampai universitas, dan ada beberapa yang meninggalkan studinya untuk terlibat dalam menentukan masa depan Timor Leste yang merdeka.

Invasi rezim Soeharto (Indonesia) juga mendapat persetujuan tidak langsung dari pemerintah Amerika Serikat dan Australia karena ketakutan mereka akan model negara *Kuba* baru di Asia Tenggara serta kekalahan Amerika Serikat di perang Vietnam, dan perang ideologi kapitalis dan komunis antara Amerika Serikat dan sekutunya melawan RRC dan Uni Soviet.

Kemerdekaan yang tertunda ini menjadi perjuangan masyarakat Timor Leste baik yang di dalam maupun yang berhasil keluar dari Timor Leste, dengan pelopor masyarakat biasa dan para Biarawan. Isu kemerdekaan dapat



diangkat ke dunia internasional, dengan keberhasilan ditetapkan sepuluh resolusi dewan keamanan PBB mulai tahun 1979, tentang kondisi administratif masih dibawah Portugal. Pencaplokan oleh rezim Soeharto (Indonesia) adalah ilegal, Timor Leste berhak menentukasn nasibnya sendiri dengan pengawasan masyarakat internasional. Pengakuan masyarakat internasional terhadap perjuangan Timor Leste menentukan nasibnya sendiri, dengan terpilihnya dua orang putra Timor Leste Uskup *Dom Carlos Pilipe Ximenes Belo* dan *José Ramos Horta* sebagai pemenang Nobel perdamaian tahun 1996 atas perjuangan mereka dalam pembebasan Timor Leste, ini merupakan bagian dari hasil perjuangan seluruh rakyat Timor Leste .

Perjuangan panjang masyarakat untuk mendapatkan kembali kemerdekaan banyak pengorbanan yang harus dilakukan, mengalami operasi sisir (operasi pembersihan), desa Janda (peristiwa *Kraras*, semua laki-laki dewasa di bunuh) , peristiwa 12 November 1991(demonstrasi besar-besran pemuda), penangkapan dan penghilangan, tragedi referendum 1999 sampai kebebasan pada tanggal 4 September tahun 1999 dengan pengumuman hasil referendum kemenangan menentukan nasib sendiri untuk masyarakat Timot Leste.

Kemerdekaan Timor Leste direstorasi pada tanggal 20 Mei tahun 2002, dengan pengakuan secara internasional dan menjadi anggota Dewan keamanan PBB yang ke 191, kebebasan penuh yang didapat Timor Leste pada milenium baru ini memberi tantangan tersendiri untuk membangun dirinya, agar bisa sejajar dengan bangsa di sekitarnya, dengan membangun infrastruktur maupun sumberdaya manusia, kantor-kantor pemerintah dan gedung-gedung negara. Gedung parlemen sebagai tempat untuk pembahasan aturan-aturan dan undang-undang pengelolaan negara.

Timor Leste setelah didirikan seagai negara, yang baru mendapat pengakuan secara internasional pada tanggal 22 Mei tahun 2002 dalam perjalananya belum memiliki gedung parlemen sendiri untuk beraktivitas. Dalam fungsi keseharian anggota parlemen Timor Leste menggunakan gedung pemerintah yang selama ini harus berbagi fasilitas dengan kegiatan



peperintahan, secara keseluruhan fasilitas untuk mendukung kegiatan parlementer kurang memadai sehingga negara Timor Leste perlu mengadakan sebuah bangunan khusus yang berfungsi sebagai gedung parlemen.

Kebutuhan akan wadah untuk menghimpun wakil-wakil dari masyarakat untuk menentukan masa depan suatu negara, perlu dibangun suatu bangunan yang bisa menggambarkan unsur budaya setempat, sehingga menjadi kebanggaan dari masyarakat itu sendiri.

Pertimbangan pemilihan lokasi karena di daerah sekitar pada jaman perjuangan merupakan tempat yang menjadi mimpi buruk bagi para pejuang kemerdekaan, dan menjadi tempat perayaan misa kudus pada saat kunjungan pemimpin Gereja Katolik Paus Yohanes Paulus II, juga sebagai tempat diadakannya restorasi kemerdekaan pada tanggal 20 Mei tahun 2002.

Lokasi terletak di ibu kota Negara *República Democrática de Timor Leste* bagian barat sub distrik *Dom Aleixo*, dengan nama tempat *Tasi Tolu* (tiga laut atau tiga danau). Terjadinya perjuangan sampai terbentuknya negara Timor Leste menjadi dasar diperlukannya Gedung Parlemen:

1. Alasan Historis

Timor Leste merupakan salah satu daerah yang mengalami proses dekolonisasi oleh Portugis mulai tahun 1512, dan memiliki sejarah perjuangan selama 450 tahun, sehingga pada tahun 1974 terjadi perubahan politik di Portugis, Portugis masuk dalam negara demokrasi, memberi peluang untuk Timor Leste mewujudkan perjuangannya untuk mendirikan sebuah negara. Mempertahankan kemerdekaan yang sudah di proklamirkan 28 November 1975 dari invasi regim Soeharto (Indonesia) selama 24 tahun.

2. Alasan Politik

Sebagai suatu negara, pengelola negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana seperti kantor pemerintahan dan gedung untuk lembaga pengawas berjalanya pemerintahan sesuai dengan konstitusi, sehingga harapan negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai.

1.2.2. Latar Belakang Permasalahan

Gedung parlemen merupakan tempat beraktivitasnya para wakil rakyat, secara tidak langsung merupakan tempat milik seluruh rakyat sehingga setiap waktu masyarakat dapat medatangi untuk menyampaikan keluhan secara langsung dimana wakil mereka beraktivitas, kondisi ini harus ditata sehingga gedung parlemen memiliki infrastruktur dan prasarana yang memadai dan mampu untuk menampung maupun memberi informasi bagi seluruh masyarakat.

Perancangan gedung parlemen Negara *República Democrática de Timor Leste* ditekankan pada perpaduan unsur etnik di masyarakat dan modernitas, sehingga wujud bangunan yang di harapkan sebagai ikon dapat dimunculkan.

Dalam pengolahan ruang perlu diperhatikan kebutuhan saat sekarang maupun kebutuhan yang akan datang sehingga penggunaan ruang dapat efektif dan efisien, unsur etnik yang dipadukan dengan unsur modernitas harus saling mendukung sehingga tidak mengurangi fungsi utama dari bangunan, apalagi membatasi fungsi bangunan itu sendiri, selain itu perpaduan unsur etnik dan modern harus memberi kondisi lebih luas kepada pemanfaatannya.

Perpaduan unsur etnis dan modern juga diharuskan memberi kondisi kepada pemamfaatan potensi alam yang berlimpah seperti sinar matahari dan angin sebagai cahaya alami dan penghawaan alami dalam ruangan, ini merupakan wujud efisiensi dan efektivitas penggunaan enegi maupun perilaku tanggap terhadap kondisi lingkungan secara umum maupun sekitar bangunan yang akan didirikan, dan bangunan harus memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna, maupun pengolahan ruangan serta fleksibilitas ruang.

Ikon merupakan makna dari suatu bentuk arsitektur yang berfungsi sebagai penanda tempat dan penanda zaman. Ikon sebagai penanda sesuatu agar mudah diingat oleh lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Beberapa karakter yang memperkuat bangunan tampil sebagai ikon kota atau negara seperti:

- Letak atau lokasi yang strategis sehingga mudah dilihat atau dikenali oleh lingkungan sekitar.
- Bentuk yang cenderung menarik sehingga mudah dijadikan tanda atau ikon dari lingkungan sekitar.
- Memiliki unsur kekuatan atau kekokohan bangunan
- Menjadi faktor dominan untuk menandai suatu tempat sebagai patokan, tujuan atau arahan.

Arsitektur ikonik dapat pula berfungsi sebagai penanda tempat (*space icon*) dari lingkungan sekitarnya, posisi yang strategis, tahan terhadap umur yang panjang, struktur bangunan yang spesifik dan memiliki nilai estetika yang menarik. Pada saat sekarang munculnya bangunan ikonik atau arsitektur ikonik tidak dapat lepas dari perkembangan globalisasi, ekonomi kapitalis, sehingga kesan mewah, megah dan mahal sudah merupakan istilah yang tidak dapat dihindari dari bangunan ikonik atau arsitektur ikonik.

Aksesibilitas dan hubungan ruang harus mendukung kegiatan di dalam bangunan, unsur etnik dan modern yang diterapkan serta perpaduan warna dan estetika yang mengandung unsur etnik harus memberi kenyamanan dalam beraktivitas.

1.3. Rumusan Permasalahan

Bagaimana wujud rancangan gedung Parlemen *República Democrática de Timor Leste* sebagai tempat berkumpulnya para wakil rakyat dengan pendekatan memadukan unsur etnik dari rumah adat budaya setempat dan unsur modern pada bangunan yang diharapkan menjadi ikon dari sebuah kota.

1.4. Tujuan dan Sasaran

1.4.1. Tujuan Umum

Menyediakan suatu wadah dalam bentuk fisik yang berfungsi sebagai Gedung Parlemen Negara *República Democrática de Timor Leste* dengan kondisi yang layak dan suasana yang mendukung untuk fungsi-fungsi kenegaraan dan membahas kepentingan penduduk Timor Leste.

1.4.2. Tujuan Khusus

Menyediakan sebuah gedung yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung fungsi-fungsi:

- Sebagai Gedung Parlemen untuk wakil rakyat.
- Sebagai sarana berkumpul para wakil rakyat beserta utusan-utusannya untuk kepentingan masyarakat yang diwakili.
- Sebagai fasilitas pendukung dalam pembuatan Peraturan perundangan Negara *República Demokrática de Timor Leste*.
- Sebagai fasilitas yang mampu memberi ekspresi nilai budaya setempat dan penggunaannya dapat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

1.4.3. Sasaran

Gedung parlemen yang akan di ujudkan sebagai ikon kota setempat didesain dengan perpaduan unsur etnik dan modern sebagai keterwakilan budaya masyarakat dan perkembangan jaman, perpaduan ini diharapkan menghasilkan kondisi yang saling mendukung pada ruang-ruang serta fungsi keseluruhan bangunan.

Sebagai penyedia fasilitas bagi wakil rakyat Negara *República Demokrática de Timor Leste* dalam rangka pembuatan peraturan perundangan didalam pengelolaan negara dan kegiatan kenegaraan lainnya.

1.5. Lingkup Studi

1.5.1. Materi Studi

1.5.1.1. Lingkup Substansial

Pembangunan gedung parlemen Negara *República Demokrática de Timor Leste* di bangun di kota *Dili*, ibu kota negara *República Demokrática de Timor Leste* dengan pendekatan konsep Post-Modern, desain yang di wujudkan yaitu perpaduan unsur etnik dan moderen sehingga bangunan meggambarkan identitas setempat segingga ada rasa memiliki dari seluruh masyarakat Timor Leste.

1.5.1.2. Lingkup *Spatial*

Lingkup *spatial* adalah membatasi wilayah perencanaan dan pengolahan yang dilaksanakan. Batasan fisik pada desain bangunan gedung parlemen Negara *República Democrática de Timor Leste* serta di sekitar wilayah site dimana bangunan itu akan di tempatkan.

1.5.1.3. Lingkup *Temporal*

Lingkup *temporal*, gedung parlemen dapat digunakan minimal 50 tahun dengan pertimbangan model arsitektur yang diterapkan dapat mengikuti perkembangan jaman, serta material bangunan yang digunakan sesuai dengan standar teknik , perencanaan struktur sesuai dengan standar teknik dan fungsi, tahapan perencanaan sampai terwujudnya bangunan dilakukan menurut standar pendirian bangunan gedung.

Waktu pembahasan desain bangunan ini dilaksanakn pada tahap tugas akhir sarjana strata - 1 (S-1) untuk memenuhi sebagian persyaratan yudisium untuk mencapai derajat sarjana teknik (S-1) pada program studi arsitektur, fakultas teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1.5.2. Pendekatan Studi

Memadukan unsur etnik masyarakat setempat dan unsur modern melalui metode pendekatan konsep *Post-Modern* untuk menghasilkan wujud bangunan modern yang memiliki unsur-unsur etnik sehingga dapat menjadi ikon sebuah kota.

1.6. Metode Studi

1.6.1. Pola Prosedural

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan pengumpulan data-data primer dan sekunder kemudian dijelaskan dan dianalisis untuk disesuaikan dengan teori-teori arsitektural serta konsep

Post-Modern yang diterapkan sehingga menghasilkan bentuk bangunan yang mencirikan etnik modernis dan bisa menjadi ikon kota setempat.

Metode Pengamatan dan perbandingan :

1. Studi *Preseden*.

Mencari referensi bangunan dengan fungsi yang sama untuk dilakukan perbandingan dan mengali ide-ide baru sehingga bangunan dapat memenuhi kebutuhan.

2. *Observasi*.

Melakukan pengamatan pada bangunan yang tidak memiliki fungsi sama namun berfungsi untuk kepentingan umum sehingga dapat di adopsi kelebihan-kelebihan yang mungkin ada.

3. Menganalisis Data.

Membuat analisa data dari data yang di dapat sehingga menjadi kelengkapan pada bangunan yang akan di desain.

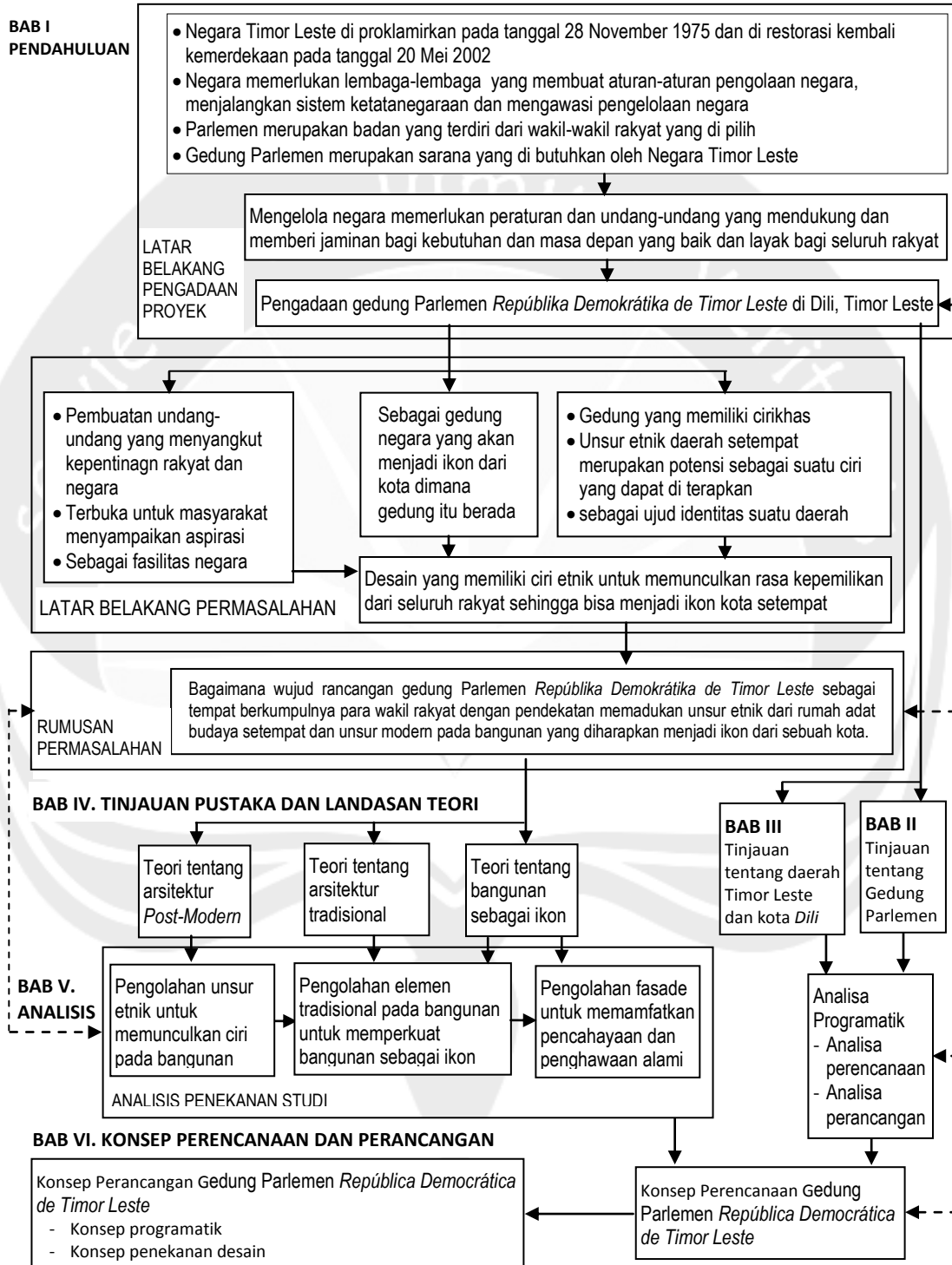
4. Menyusun Konsep Perencanaan dan Perancangan.

Membuat koreksi-koreksi pada analisa-analisa yang di buat untuk mendapatkan kesimpulan sehingga dapat menyempurnakan desain.

5. Membuat Desain Skematik.

Untuk menerapkan ide-ide dan konsep perencanaan melalui desain skematik yang dapat ditingkatkan mendaji desain arsitektural.

1.6.2. Tata Langkah



Bagan 1.1 Tata Langkah

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi: pengertian, judul proyek, latar belakang pengadaan proyek, latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup studi, metode studi, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM GEDUNG PARLEMEN

Pembahasan gedung parlemen, pengertian dan fungsi dari bangunan, pendekatan obyek studi dan hal-hal yang berhubungan dengan gedung parlemen.

BAB III TINJAUAN KAWASAN

Tinjauan wilayah Timor Leste dan kota *Dili* serta lokasi site, kondisi administrative, kebijakan tata ruang dan kawasan, tata bangunan, sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya dan ekonomi, kondisi georgafis, geologi dan iklim setempat.

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Tinjaua tentang landasan teori peruangan serta konsep-konsep arsitektur post modern sebagai landasan konsep desain dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga menghasilkan bangunan yang berfungsi sebagai gedung parlemen dalam pengelolaan ruang yang efisien serta tanggap terhadap lingkungan sekitar.

BAB V ANALISIS

Analisa site terhadap lingkungan luar dan dalam, analisis pelaku dan pola kegiatan, kebutuhan ruang dan hubungan ruang, pola peruangan, struktur dan konstruksi, kelengkapan bangunan dan utilitas serta ujud bangunan berhubungan dengan konsep desain.

BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Konsep perencanaan dan perancangan bangunan gedung parlemen, tanggapan-tanggapannya dari analisa, yang diterapkan untuk menghasilkan bangunan yang aman nyaman untuk beraktifitas baik di sekitar bangunan maupun di dalam bangunan serta wujud dari konsep desain yang di terapkan.

BAB VII DESAIN SKEMATIK

Site Plan, Denah, Tampak, Potongan

DAFTAR PUSTAKA

Daftar sumber dan kutipan-kutipan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir Arsitektur.

LAMPIRAN-LAMPIRAN